Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 3 2026, hal 3492-3505
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3492-3505
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Kontribusi Lembaga Keagamaan dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Berdasarkan SDGs 10 di Sumatera Utara

Fikri Ahmadi[1], Jufri Naldo[2], Fitriani[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : ahmadifikri21@gmail.com [1]; jufrinaldo@uinsu.ac.id [2]; fitriani@uinsu.ac.id [3]

Abstrak

Kesenjangan sosial masih menjadi tantangan pembangunan di Sumatera Utara meskipun pertumbuhan ekonomi daerah terus berlangsung. Dalam masyarakat yang multireligius, lembaga keagamaan memiliki potensi strategis untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 10 mengenai pengurangan kesenjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi lembaga keagamaan dalam mengurangi kesenjangan sosial serta mengidentifikasi bentuk kegiatan, persamaan nilai, perbedaan pendekatan, dan peluang kolaborasi antarlembaga keagamaan di Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi komparatif dan perspektif sosiologi agama. Data diperoleh melalui wawancara dengan enam tokoh agama, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, perbandingan temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki kesamaan nilai berupa keadilan, kasih sayang, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, filantropi, bantuan sosial, dan penguatan solidaritas masyarakat. Meskipun bentuk program dan dasar ajarannya berbeda, seluruh lembaga keagamaan berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial. Kontribusi tersebut dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang terencana antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kata kunci: *Lembaga Keagamaan; Kesenjangan Sosial; SDGs Tujuan 10; Solidaritas Sosial; Sumatera Utara.*

Religious Institutions' Contributions to Reducing Social Inequality Under SDG 10 in North Sumatra

Abstract

Social inequality remained a significant development challenge in North Sumatra despite continued regional economic growth. In a multireligious society, religious institutions have strategic potential to support the achievement of Sustainable Development Goal 10 concerning reduced inequalities. This study aimed to analyze the contributions of religious institutions to reducing social inequality and identify their activities, shared values, different approaches, and opportunities for interreligious collaboration in North Sumatra. This study employed a descriptive qualitative approach, a comparative method, and the perspective of the sociology of religion. Data were collected through interviews with six religious leaders, observation, documentation, and a literature review. The data were analyzed through data reduction, data presentation, comparative interpretation, and conclusion drawing. The findings showed that religious institutions shared common values, including justice,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

compassion, solidarity, respect for human dignity, and social responsibility. These values were implemented through economic empowerment, educational assistance, healthcare services, philanthropy, social aid, and community solidarity programs. Although the institutions applied different programs based on their respective religious teachings, all contributed to reducing social inequality. Their contributions could be strengthened through systematic collaboration among government institutions, religious organizations, businesses, academics, and local communities.
Keywords: *religious institutions; social inequality; Sustainable Development Goal 10; social solidarity; North Sumatra.*

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Agenda tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan yang memiliki hubungan langsung dengan persoalan keadilan sosial ialah SDGs Tujuan 10, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara. Tujuan ini menekankan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perluasan inklusi sosial, ekonomi, dan politik, penghapusan diskriminasi, serta penguatan kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (United Nations, 2015; United Nations Development Programme, t.t.).

Kesenjangan sosial tidak hanya terlihat dari perbedaan tingkat pendapatan, tetapi juga dari ketidakmerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, teknologi, dan fasilitas publik. Ketika sumber daya pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sebagian masyarakat akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kondisi tersebut dapat memperkuat kemiskinan antargenerasi, membatasi mobilitas sosial, dan menimbulkan perasaan tidak adil di tengah masyarakat. Karena itu, pengurangan kesenjangan memerlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat (Faganza & Shoheh, 2023).

Persoalan kesenjangan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Sumatera Utara. Provinsi ini memiliki wilayah yang luas, karakter masyarakat yang beragam, serta perbedaan kondisi pembangunan antara kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pedalaman. Data menunjukkan bahwa Gini Ratio Sumatera Utara pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,309. Angka tersebut memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat masih belum sepenuhnya merata (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023). Ketimpangan juga tampak pada perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha, infrastruktur, dan teknologi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Kota Medan dan beberapa wilayah perkotaan berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa, sedangkan sebagian masyarakat di kawasan perdesaan masih menghadapi keterbatasan kesempatan ekonomi dan pelayanan dasar.

Upaya mengurangi kesenjangan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Oleh sebab itu, keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan sangat diperlukan. Kolaborasi antarpihak dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan, serta mendorong masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan yang bersifat sementara. Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, dan penguatan pemasaran dapat membantu masyarakat memperoleh pendapatan secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Hasibuan dkk., 2024).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Lembaga keagamaan memiliki kedudukan penting karena keberadaannya dekat dengan kehidupan masyarakat. Lembaga tersebut tidak hanya mengurus kegiatan peribadatan, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan, pelayanan sosial, pembinaan moral, filantropi, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh dan organisasi keagamaan juga membuat lembaga keagamaan memiliki kemampuan untuk menggerakkan partisipasi sosial. Dalam perspektif sosiologi agama, ajaran agama dapat mendorong perubahan sosial ketika nilai-nilai keagamaan diterjemahkan menjadi tindakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan cara tersebut, agama tidak berhenti sebagai sistem keyakinan pribadi, tetapi menjadi kekuatan sosial yang dapat memperkuat solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab bersama (Nasution dkk., 2024).

Setiap agama memiliki nilai yang dapat dijadikan landasan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Islam mengajarkan keadilan, persaudaraan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kekristenan menempatkan kasih kepada sesama sebagai dasar pelayanan terhadap orang miskin, sakit, terlantar, dan tertindas. Hindu mengajarkan *dharma*, *ahimsa*, dan kasih sayang sebagai pedoman untuk menjalankan kewajiban moral tanpa merugikan orang lain. Buddha menekankan *dana*, *metta*, dan *karuna* sebagai praktik berbagi, cinta kasih, dan kepedulian untuk mengurangi penderitaan. Khonghucu mengajarkan *ren* dan *yi* sebagai dasar cinta kasih, keadilan, dan hubungan sosial yang harmonis. Meskipun memiliki istilah dan dasar ajaran yang berbeda, nilai-nilai tersebut memiliki titik temu berupa keadilan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, solidaritas, dan tanggung jawab sosial (Rogahang, 2024; Tamboto, 2025).

Nilai keagamaan tersebut telah diwujudkan melalui berbagai program sosial. Lembaga Islam mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk bantuan konsumtif, beasiswa, layanan kesehatan, perbaikan rumah, modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan zakat secara kelembagaan dapat membantu mengurangi kemiskinan karena penyalurannya dapat diarahkan melalui program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga dapat digunakan sebagai modal produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Hidayati dkk., 2024; Ramadhona dkk., 2023). Zakat dan wakaf juga memiliki hubungan yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena keduanya dapat mendukung redistribusi pendapatan, penyediaan fasilitas sosial, dan perluasan pelayanan bagi kelompok yang kurang mampu (Lahuri dkk., 2021).

Kontribusi sosial juga dijalankan oleh lembaga keagamaan non-Islam. Gereja melaksanakan pelayanan sosial melalui sekolah, rumah sakit, panti asuhan, bantuan kepada keluarga miskin, serta pendampingan ekonomi dan pastoral. Pelayanan pastoral tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan material, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan martabat, peningkatan kemampuan, dan penguatan solidaritas masyarakat (Supit dkk., 2025). Lembaga Hindu menjalankan bakti sosial, bantuan pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan berdasarkan nilai *dharma* dan *ahimsa*. Nilai tersebut mendorong setiap individu untuk menjaga keseimbangan, bertindak jujur, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama (Susanti dkk., 2024).

Lembaga Buddha berkontribusi melalui praktik *dana*, pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan sosial berbasis cinta kasih. Praktik tersebut dapat menumbuhkan empati, mengurangi sikap mementingkan diri sendiri, dan memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan (Sugata dkk., 2025). Lembaga Khonghucu juga melaksanakan bantuan sosial, pembagian kebutuhan pokok, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok rentan berdasarkan nilai *ren* dan *yi*. Dalam ajaran tersebut, kekayaan dan kemajuan ekonomi tidak seharusnya hanya dinikmati secara pribadi, tetapi perlu memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis (Kuncono, 2025). Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa setiap agama memiliki sumber daya etis dan kelembagaan yang dapat mendukung pengurangan kesenjangan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara agama, kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu agama atau satu bentuk kegiatan tertentu. Kajian tentang Islam umumnya menempatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi ekonomi (Hidayati dkk., 2024; Lahuri dkk., 2021; Ramadhona dkk., 2023). Penelitian mengenai Kristen lebih banyak membahas pelayanan pastoral dan peran gereja dalam membantu masyarakat miskin (Supit dkk., 2025). Kajian tentang Hindu menyoroti nilai *dharma* dalam membangun keadilan sosial, sedangkan penelitian tentang Buddha membahas praktik *dana* dan kegiatan sosial sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama (Sugata dkk., 2025; Susanti dkk., 2024). Sementara itu, kajian mengenai Khonghucu menekankan pentingnya kepemimpinan beretika, cinta kasih, dan pemerataan kesejahteraan (Kuncono, 2025).

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami kontribusi sosial setiap agama. Akan tetapi, kajian yang membandingkan kontribusi lembaga dari enam agama dalam satu wilayah masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak menghubungkan program sosial lembaga keagamaan secara langsung dengan indikator dan tujuan SDGs Tujuan 10. Padahal, pendekatan komparatif diperlukan untuk mengetahui persamaan nilai, perbedaan bentuk pelayanan, kendala yang dihadapi, dan peluang kolaborasi antarlembaga keagamaan. Pembahasan lintas agama juga penting agar program kesejahteraan tidak berjalan secara terpisah dan hanya melayani kelompok internal, tetapi dapat dikembangkan menjadi gerakan kemanusiaan yang lebih luas. Kerja sama berbasis rumah ibadah dan lembaga keagamaan berpotensi memperkuat moderasi beragama karena perjumpaan antarumat tidak hanya berlangsung dalam dialog, tetapi juga melalui kegiatan bersama untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan (Rahman, 2022).

Sumatera Utara menjadi wilayah yang relevan untuk kajian tersebut karena masyarakatnya terdiri atas beragam agama, etnis, budaya, dan organisasi sosial. Pengalaman membangun hubungan antarumat beragama dapat menjadi modal sosial untuk mengembangkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Hubungan sosial yang dibangun melalui komunikasi, kerja sama, dan kepedulian bersama dapat membantu masyarakat memulihkan kepercayaan dan menjaga kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan(Fitriani dkk., 2020). Keragaman tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai ruang penting untuk melihat bagaimana ajaran agama diterjemahkan menjadi program sosial dan bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi lembaga keagamaan dalam mengurangi kesenjangan sosial di Sumatera Utara berdasarkan SDGs Tujuan 10. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya yang telah dijalankan oleh lembaga Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta membandingkan nilai, bentuk program, dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, penelitian diarahkan untuk menemukan peluang kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi agama mengenai agama sebagai aktor pembangunan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pengurangan kesenjangan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi komparatif dan perspektif sosiologi agama. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan tindakan lembaga keagamaan dalam mengurangi kesenjangan sosial di Sumatera Utara. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan nilai dasar, bentuk kegiatan, strategi pelayanan, dan kontribusi lembaga dari enam agama terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 10. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari pengalaman

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dan pemaknaan subjek penelitian, sedangkan studi komparatif membantu menemukan persamaan dan perbedaan di antara objek yang dibandingkan (Rahmadi, 2023; Sahir, 2021). Perspektif sosiologi agama digunakan untuk melihat agama sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi solidaritas, perilaku, dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi persoalan kesenjangan.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 di Provinsi Sumatera Utara, terutama pada lembaga dan organisasi keagamaan yang menjalankan kegiatan sosial, filantropi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keberadaan program sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan, keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi, serta keterlibatannya dalam membantu masyarakat rentan. Objek penelitian mencakup lembaga Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang beroperasi di Sumatera Utara. Pemilihan lembaga tersebut memungkinkan penelitian menggambarkan keberagaman nilai dan strategi keagamaan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial.

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman, jabatan, dan keterlibatannya dalam kegiatan sosial-keagamaan. Informan penelitian terdiri atas enam tokoh yang mewakili Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Sumatera Utara, Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Medan. Para informan dipilih karena memahami ajaran sosial agamanya dan terlibat dalam pengelolaan program yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai pandangan agama terhadap kesenjangan, bentuk kontribusi lembaga, pelaksanaan program sosial, kelompok penerima manfaat, kendala pelaksanaan, dan peluang kerja sama lintas agama. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan pengalaman dan penjelasan secara terbuka, tetapi tetap sesuai dengan fokus penelitian.

Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan lembaga keagamaan, pelaksanaan kegiatan sosial, serta hubungan antara pengelola program dan masyarakat penerima manfaat. Dokumentasi mencakup laporan kegiatan, profil lembaga, data program sosial, foto, video, publikasi media sosial, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui buku, artikel jurnal, laporan lembaga keagamaan, dokumen pemerintah, data Badan Pusat Statistik, serta publikasi mengenai SDGs Tujuan 10. Penggunaan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur bertujuan memperoleh data yang lebih lengkap dan memungkinkan pemeriksaan silang terhadap informasi yang disampaikan oleh para informan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-komparatif sejak proses pengumpulan data berlangsung. Tahap pertama dilakukan dengan menyalin dan mengorganisasikan hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan beberapa tema, yaitu nilai dasar ajaran agama, bentuk kegiatan sosial, pendekatan lembaga, kelompok penerima manfaat, kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan, kendala program, dan peluang kolaborasi. Informasi yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tahap berikutnya dilakukan dengan membandingkan data dari enam lembaga keagamaan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pada aspek nilai, pendekatan, pelaksanaan program, serta kontribusinya terhadap SDGs Tujuan 10. Hasil perbandingan kemudian ditafsirkan menggunakan perspektif sosiologi agama untuk menjelaskan hubungan antara ajaran keagamaan, tindakan sosial, solidaritas, dan pemberdayaan masyarakat. Keabsahan temuan diperkuat melalui pemeriksaan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dokumen lembaga, dan sumber literatur. Kesimpulan ditarik setelah pola kontribusi masing-masing lembaga, titik temu antarlembaga, dan peluang kolaborasi lintas agama dapat diidentifikasi secara konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Islam melalui Redistribusi dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi lembaga keagamaan Islam dalam mengurangi kesenjangan sosial di Sumatera Utara bertumpu pada prinsip kesetaraan manusia, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial. Setiap manusia dipandang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. sehingga perbedaan ekonomi tidak boleh menyebabkan kelompok tertentu kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Kesenjangan yang terlalu lebar tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kemiskinan berkepanjangan, pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan konflik sosial. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan memerlukan kerja bersama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat (M. Hatta, komunikasi pribadi, 17 Juli 2026).

Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan kepemilikan ekonomi dalam masyarakat, tetapi menolak pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu. Harta dipahami sebagai amanah yang di dalamnya terdapat hak kelompok miskin dan rentan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam salah satu bagian QS. Al-Hasyr [59]: 7 (Kementerian Agama RI, 2019):

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

Artinya: *"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat tersebut memberikan landasan moral bahwa distribusi sumber daya perlu diarahkan untuk memperluas manfaat kekayaan kepada kelompok yang kurang mampu. Prinsip itu diterapkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen sosial-keagamaan. Zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat secara kelembagaan memungkinkan bantuan disalurkan secara lebih terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan dibandingkan pemberian individual yang tidak terkoordinasi (Hidayati dkk., 2024; Makhrus, 2018).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menerjemahkan prinsip tersebut melalui lima program utama, yaitu Sumut Taqwa, Sumut Peduli, Sumut Sehat, Sumut Cerdas, dan Sumut Makmur. Sumut Taqwa diarahkan pada pembinaan spiritual dan penguatan moral masyarakat. Sumut Peduli berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang tertimpa bencana atau keadaan darurat. Sumut Sehat membuka akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan, sedangkan Sumut Cerdas memberikan beasiswa dan perlengkapan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah (M. Hatta, komunikasi pribadi, 17 Juli 2026).

Program Sumut Makmur memiliki orientasi yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi. Program tersebut memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kepada penerima manfaat. Bantuan tidak diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki sumber penghasilan secara mandiri. Tujuan jangka panjangnya ialah mendorong perubahan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

status penerima zakat atau *mustahik* menjadi individu yang mandiri dan berpotensi menjadi pemberi zakat atau *muzaki*. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan dari pola bantuan karitatif menuju pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

Pendayagunaan dana zakat untuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan memiliki hubungan langsung dengan pengurangan kesenjangan. Pemberian modal tanpa peningkatan keterampilan dapat membuat program berhenti ketika modal telah habis. Sebaliknya, penggabungan bantuan modal dengan pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan penerima dalam mengelola usaha, menghadapi risiko, dan mengembangkan pemasaran. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa zakat produktif berpotensi memperkuat kemandirian fakir miskin dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat apabila dikelola melalui program yang terukur dan berkelanjutan (Hidayati dkk., 2024; Ramadhona dkk., 2023).

Program lembaga keagamaan Islam juga dilaksanakan secara inklusif, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan kesehatan. Bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan tanpa menjadikan agama, etnis, dan latar belakang sosial sebagai pembatas utama. Pendekatan tersebut mencerminkan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* dan memperluas fungsi zakat serta filantropi Islam dari pelayanan internal umat menuju kepedulian kemanusiaan. Dengan demikian, kontribusi Islam terhadap SDGs Tujuan 10 bergerak melalui redistribusi kekayaan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa zakat dan wakaf dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Lahuri dkk., 2021; Maulidha dkk., 2024).

Pelayanan Sosial Kristen Protestan dan Katolik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Kristen Protestan dalam mengurangi kesenjangan berangkat dari pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab setiap orang beriman. Iman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui partisipasi dalam memperbaiki keadaan sosial. Masyarakat didorong untuk mengusahakan kesejahteraan lingkungan tempat tinggalnya melalui pemikiran, tenaga, keterampilan, dan kegiatan pelayanan. Pandangan tersebut menempatkan gereja sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar (Apinem, komunikasi pribadi, 21 Mei 2026).

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara menjalankan fungsi tersebut melalui pembinaan terhadap 48 sinode anggotanya. Pembinaan diarahkan agar pelayanan gereja tidak hanya berpusat pada kegiatan spiritual, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan sosial dipandang perlu menghasilkan perubahan jangka panjang. Karena itu, penyediaan akses terhadap jalan, sanitasi, keamanan, pendidikan, dan kepastian hukum dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif yang hanya meringankan kebutuhan untuk sementara waktu (Apinem, komunikasi pribadi, 21 Mei 2026).

Kontribusi langsung dalam bidang ekonomi dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, budidaya jamur tiram, hidroponik, dan bisnis daring bagi generasi muda. Kegiatan tersebut memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Model ini menunjukkan bahwa pengurangan kesenjangan tidak hanya dilakukan dengan membagikan sumber daya, tetapi juga dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang tersedia.

Pelayanan sosial Kristen Protestan juga dilaksanakan melalui aksi lintas agama yang diselenggarakan beberapa kali dalam setahun. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan tidak dibatasi oleh identitas keagamaan penerima. Selain bantuan sosial, gerakan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Rumah Peduli dan Departemen Ekonomi Sosial menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki sumber daya dan kelompok yang membutuhkan. Pola tersebut menciptakan redistribusi sosial sekaligus memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat. Solidaritas yang terorganisasi dapat menjadi modal sosial untuk mengurangi jarak antara kelompok berkecukupan dan kelompok rentan (Fathoni, 2024).

Perhatian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari kontribusi Kristen Protestan. Gerakan penanaman pohon dan Surat Pastoral Tobat Ekologi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan berkaitan dengan kesenjangan sosial. Kerusakan lingkungan sering kali memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat miskin yang kehidupannya bergantung pada pertanian, air, hutan, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak masyarakat atas ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan, integritas sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pada Gereja Katolik, kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan berlandaskan Ajaran Sosial Gereja yang menempatkan martabat manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, dan keberpihakan kepada kelompok miskin sebagai prinsip utama. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak pekerja, kelompok rentan, dan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kepentingannya. Kemajuan seharusnya dinilai bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesempatan setiap orang untuk hidup layak, bekerja, memperoleh pendidikan, dan menerima manfaat pembangunan secara adil (Kristian, 2025).

Nilai tersebut dilaksanakan melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi pada tingkat keuskupan. Komisi ini menghubungkan ajaran gereja dengan program pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pembangunan masyarakat. Keberadaan struktur kelembagaan tersebut membuat pelayanan sosial dapat direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Kegiatan sosial tidak hanya dilakukan sebagai respons sesaat, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan gereja terhadap persoalan masyarakat (P. B. O. Tage, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Kepedulian sosial juga dibangun melalui tradisi puasa. Umat diajak mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, kemudian mengumpulkan dana hasil penghematan untuk membantu masyarakat miskin. Praktik tersebut menghubungkan pengendalian diri dengan redistribusi sumber daya. Puasa tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan spiritual, tetapi juga sebagai latihan untuk memahami kesulitan orang lain dan berbagi dengan kelompok yang membutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa pelayanan keagamaan perlu menyentuh kebutuhan material, sosial, dan psikologis masyarakat (Supit dkk., 2025).

Kontribusi Gereja Katolik di Sumatera Utara juga diwujudkan melalui pembangunan fasilitas dasar, antara lain penyediaan air bersih di Sidamanik dan pembangunan jembatan di Sigaporas. Penyediaan air bersih membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, sedangkan pembangunan jembatan membuka akses transportasi dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Program semacam ini memiliki dampak yang lebih panjang daripada bantuan konsumtif karena memperbaiki kondisi yang menjadi penyebab terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (P. B. O. Tage, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Selain pelayanan langsung, Gereja Katolik menjalankan fungsi kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat miskin. Fungsi tersebut penting karena kesenjangan tidak selalu disebabkan oleh lemahnya individu, tetapi juga oleh struktur dan kebijakan yang tidak memberikan akses secara merata. Advokasi membantu memastikan bahwa pembangunan, penggunaan teknologi, dan pengelolaan anggaran tetap berorientasi pada martabat serta kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kontribusi Kristen Protestan dan Katolik terhadap SDGs Tujuan 10 mencakup pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pembangunan fasilitas dasar, pelestarian lingkungan, pembentukan integritas, dan pengawasan moral terhadap kebijakan publik.

Pemberdayaan Berbasis Etika Hindu, Buddha, dan Khonghucu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Hindu menempatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari keseimbangan antara kebahagiaan rohani dan kehidupan duniawi. Prinsip *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma* mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan spiritual sekaligus menciptakan kesejahteraan bersama. Pencapaian tersebut didukung oleh *Tri Kaya Parisudha*, yaitu penyucian pikiran melalui *manacika*, ucapan melalui *wacika*, dan tindakan melalui *kayika*. Ketiga unsur ini membentuk pribadi yang berpikir baik, berbicara jujur, dan bertindak untuk membantu sesama (S. Raja, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Pembentukan karakter melalui *Tri Kaya Parisudha* berkaitan dengan pengurangan kesenjangan karena ketidakadilan tidak hanya muncul akibat kekurangan sumber daya, tetapi juga dapat disebabkan oleh keserakahan, ketidakjujuran, dan kurangnya kepedulian. Ketika pikiran, perkataan, dan tindakan diarahkan pada kebaikan, individu terdorong untuk menggunakan kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai tersebut sejalan dengan konsep *dharma* yang menekankan tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan dan memperjuangkan kesejahteraan bersama (Susanti dkk., 2024).

Kepedulian sosial Hindu diwujudkan melalui *Dana Punia*. Praktik ini tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi mencakup *Dharmadana*, *Widyadana*, dan *Arthadana*. *Dharmadana* merupakan pemberian nilai kebajikan dan pembinaan moral, *Widyadana* berupa pemberian ilmu pengetahuan, sedangkan *Arthadana* berbentuk bantuan material. Pemberian ilmu dan pembinaan moral dipandang memiliki manfaat jangka panjang karena membantu seseorang meningkatkan kemampuan dan menentukan jalan hidupnya secara mandiri (S. Raja, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Pendekatan tersebut menempatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari pengurangan kesenjangan. Bantuan material dapat memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi belum tentu mengubah keadaan penerima dalam jangka panjang. Sebaliknya, pemberian ilmu, keterampilan, dan pembinaan karakter dapat meningkatkan kapasitas seseorang untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena itu, kontribusi Hindu terhadap SDGs Tujuan 10 bergerak melalui pembentukan karakter, pendidikan, budaya berbagi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam ajaran Buddha, upaya mengurangi kesenjangan diawali dengan perbaikan perilaku individu. Kesabaran, kesadaran, dan sikap saling menghormati dipandang sebagai dasar hubungan sosial yang harmonis. Kesabaran bukan sikap pasif, tetapi kemampuan mengendalikan diri agar seseorang tidak membalas tindakan buruk dengan tindakan serupa. Pengendalian diri dapat mengurangi konflik, diskriminasi, dan tindakan yang merugikan kelompok lain (B. Mukhtar, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Pembentukan karakter tersebut diperkuat melalui konsep *Bodhicitta* dan empat sikap luhur *Brahmavihara*, yaitu *metta*, *karuna*, *mudita*, dan *upekkha*. *Metta* mendorong cinta kasih kepada semua makhluk, sedangkan *karuna* menggerakkan kepedulian nyata terhadap orang yang menderita. *Mudita* mengajarkan rasa bahagia atas keberhasilan orang lain sehingga mengurangi kecemburuan sosial. Adapun *upekkha* membentuk keseimbangan batin dan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial seseorang.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar praktik *dana* atau kedermawanan. Umat didorong untuk berbagi secara rutin dan tidak hanya menunggu kegiatan keagamaan tertentu. Bantuan diberikan berdasarkan kesadaran bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga mengandung tanggung jawab terhadap orang lain. Praktik berbagi dapat memperkuat solidaritas sosial dan memperluas dukungan kepada kelompok miskin. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang memperlihatkan bahwa praktik *dana*, *metta*, dan *karuna* mampu menumbuhkan empati serta memperkuat kepedulian sosial masyarakat (Sugata dkk., 2025).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kontribusi Khonghucu dalam mengurangi kesenjangan menekankan keseimbangan antara kemandirian pribadi dan kepedulian sosial. Seseorang didorong untuk memperkuat karakter, ilmu pengetahuan, dan kemampuan ekonominya terlebih dahulu agar dapat membantu orang lain secara lebih baik. Bantuan sosial tidak selalu diberikan dalam bentuk materi, tetapi dapat berupa pendidikan, tenaga, pemikiran, dan keterampilan. Pendekatan ini bertujuan agar penerima bantuan tidak terus berada dalam ketergantungan, melainkan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri (M. Linggouw, komunikasi pribadi, 5 Mei 2026).

Pendidikan menempati posisi penting karena pengetahuan yang dimiliki seseorang mengandung tanggung jawab untuk dibagikan kepada orang lain. Berbagi ilmu dipandang memiliki nilai yang setara dengan memberikan bantuan material. Pendidikan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, dan membantu kelompok rentan keluar dari keterbatasan sosial-ekonomi. Prinsip tersebut mendukung pembentukan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki pengetahuan dan karakter yang kuat.

Landasan moral kontribusi Khonghucu terdiri atas *ren*, *yi*, *li*, *zhi*, dan *xin*. *Ren* mengajarkan cinta kasih, *yi* menekankan keadilan, *li* mengatur kesusilaan dan hubungan sosial, sedangkan *zhi* menekankan kebijaksanaan. Penerapan keempat nilai tersebut melahirkan *xin*, yaitu integritas dan sikap dapat dipercaya. Nilai-nilai tersebut membentuk manusia berbudi luhur atau *junzi* yang mampu menggunakan pengetahuan dan sumber dayanya untuk kepentingan bersama. Pembentukan karakter tersebut dapat mengurangi diskriminasi, memperkuat keadilan, dan menjaga keharmonisan masyarakat multikultural (Kasyfurrahman dkk., 2020; Munthe dkk., 2024).

Temuan mengenai Hindu, Buddha, dan Khonghucu menunjukkan bahwa pengurangan kesenjangan tidak hanya dilakukan melalui redistribusi materi. Perubahan juga memerlukan pendidikan, pembentukan moral, peningkatan kemampuan individu, dan penguatan budaya berbagi. Ketiga agama tersebut menempatkan karakter sebagai dasar tindakan sosial. Karakter yang baik mendorong seseorang memberikan bantuan dengan tulus, memperlakukan orang lain secara adil, dan menghindari perilaku yang merugikan masyarakat. Nilai-nilai tersebut turut memperkuat kerukunan dan kerja sama lintas agama di tengah masyarakat yang beragam (Lastriana dkk., 2025).

Analisis Komparatif dan Kontribusi terhadap SDGs Tujuan 10

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa seluruh agama memiliki titik temu dalam memandang pengurangan kesenjangan sebagai tanggung jawab moral. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan dengan sesama. Nilai keadilan, kasih sayang, solidaritas, kedermawanan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial ditemukan dalam seluruh ajaran yang diteliti. Perbedaannya terletak pada istilah, dasar teologis, bentuk kelembagaan, dan strategi pelaksanaan program.

Islam lebih menonjolkan mekanisme redistribusi yang terstruktur melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kristen Protestan memberikan perhatian besar pada partisipasi masyarakat, pembangunan integritas, dan peningkatan keterampilan ekonomi. Gereja Katolik memadukan pelayanan sosial, pembangunan fasilitas dasar, dan advokasi terhadap kebijakan publik. Hindu menempatkan pembentukan karakter dan pemberian ilmu sebagai bagian penting dari *Dana Punia*. Buddha menekankan perubahan moral individu melalui cinta kasih dan welas asih, sedangkan Khonghucu menggabungkan pendidikan, kemandirian, integritas, dan budaya berbagi.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tabel 1. Perbandingan Kontribusi Lembaga Keagamaan terhadap SDGs Tujuan 10

Agama	Nilai Utama	Bentuk Implementasi	Kontribusi terhadap SDGs Tujuan 10
Islam	Keadilan, zakat, dan ta'awun	Sumut Makmur, Sumut Cerdas, Sumut Sehat, Sumut Peduli, dan Sumut Taqwa	Redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Kristen Protestan	Kasih, pelayanan, integritas, dan partisipasi	Pelatihan UMKM, budidaya, bisnis daring, Rumah Peduli, aksi lintas agama, dan pelestarian lingkungan	Peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, solidaritas sosial, dan perlindungan lingkungan
Katolik	Martabat manusia, solidaritas, caritas, dan kesejahteraan bersama	Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, aksi puasa, bantuan sosial, air bersih, jembatan, dan advokasi	Perluasan pelayanan dasar, pembangunan wilayah, redistribusi sosial, dan kebijakan yang berkeadilan
Hindu	Tri Kaya Parisudha, dharma, dan Dana Punia	Dharmadana, Widyadana, dan Arthadana	Pembentukan karakter, pendidikan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat
Buddha	Metta, karuna, mudita, dan upekkha	Praktik dana, kepedulian sosial, pembentukan karakter, dan aksi berbagi	Penguatan solidaritas, pengurangan diskriminasi, dan kesejahteraan bersama
Khonghucu	Ren, yi, li, zhi, dan xin	Pendidikan, bantuan personal, tenaga, pemikiran, dan penguatan etos kerja	Peningkatan kapasitas individu, kemandirian ekonomi, integritas, dan kepedulian sosial

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi lembaga keagamaan terhadap SDGs Tujuan 10 bergerak melalui tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah dimensi moral, yaitu pembentukan karakter yang adil, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dimensi kedua adalah dimensi sosial, yaitu penguatan solidaritas, filantropi, dan pelayanan terhadap kelompok rentan. Dimensi ketiga adalah dimensi pemberdayaan, yaitu peningkatan pendidikan, keterampilan, akses ekonomi, kesehatan, serta fasilitas dasar masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Bantuan material tanpa pembentukan karakter dan pemberdayaan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebaliknya, pembinaan moral tanpa program yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan sulit menghasilkan perubahan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga keagamaan yang menggabungkan bantuan langsung, pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembangunan fasilitas memiliki peluang lebih besar untuk memberikan dampak berkelanjutan. Karena itu, program sosial keagamaan perlu diarahkan dari sekadar santunan sesaat menuju pemberdayaan yang memperkuat kemampuan masyarakat.

Kontribusi lembaga keagamaan juga memperlihatkan bahwa agama dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh dan lembaga agama dapat memudahkan mobilisasi bantuan, penyampaian pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan sosial. Jaringan rumah ibadah menjangkau masyarakat hingga tingkat lokal sehingga dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan kelompok rentan. Agama juga menyediakan dasar moral yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara sukarela dalam pelayanan sosial (Nasution dkk., 2024).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Meskipun demikian, program lembaga keagamaan masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Keterbatasan koordinasi dapat menyebabkan adanya wilayah atau kelompok yang menerima beberapa bantuan sekaligus, sementara kelompok lain belum terjangkau. Selain itu, bantuan yang tidak disertai pendataan dan evaluasi dapat menyulitkan pengukuran dampak program terhadap pengurangan kesenjangan. Oleh sebab itu, diperlukan pertukaran data, pembagian peran, dan perencanaan bersama antara pemerintah dan lembaga keagamaan.

Kerja sama lintas agama juga berpotensi memperkuat moderasi beragama. Pertemuan antarumat tidak hanya dilakukan melalui dialog mengenai keyakinan, tetapi melalui kegiatan bersama untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bencana. Kolaborasi dalam persoalan kemanusiaan dapat membangun rasa saling percaya dan memperlihatkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama (Rahman, 2022).

Dalam konteks Sumatera Utara, model kolaborasi dapat melibatkan pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan penyedia data, lembaga keagamaan sebagai pelaksana yang dekat dengan masyarakat, dunia usaha sebagai pendukung pembiayaan, perguruan tinggi sebagai penyedia kajian dan evaluasi, serta masyarakat sebagai pelaku utama program. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pelatihan kerja, pendampingan UMKM, beasiswa lintas agama, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah, dan respons bencana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga keagamaan memiliki kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan sosial di Sumatera Utara. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, seluruh agama mengarah pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan martabat manusia, memperluas kesempatan, melindungi kelompok rentan, dan mewujudkan kehidupan yang adil. Penguatan kolaborasi dan perubahan orientasi dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan berkelanjutan akan memperbesar kontribusi lembaga keagamaan terhadap pencapaian SDGs Tujuan 10.

SIMPULAN

Lembaga keagamaan di Sumatera Utara memiliki kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pencapaian SDGs Tujuan 10. Kontribusi tersebut dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan fasilitas dasar, pembinaan karakter, filantropi, dan penguatan solidaritas masyarakat. Islam menonjolkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf; Kristen Protestan mengembangkan pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, dan kepedulian lingkungan; Katolik menjalankan pemberdayaan, pembangunan fasilitas dasar, dan advokasi sosial; Hindu menekankan *Dana Punia* dan pendidikan; Buddha mengembangkan praktik *dana*, *metta*, dan *karuna*; sedangkan Khonghucu memperkuat pendidikan, kemandirian, integritas, dan kepedulian sosial. Meskipun memiliki dasar ajaran dan bentuk program yang berbeda, seluruh lembaga keagamaan memiliki nilai yang sama, yaitu keadilan, kasih sayang, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial.

Kontribusi lembaga keagamaan dapat ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih terencana antara pemerintah, organisasi keagamaan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Program sosial sebaiknya tidak hanya berupa bantuan sementara, tetapi juga diarahkan pada pendidikan, pelatihan, pendampingan usaha, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan kemandirian penerima manfaat. Pertukaran data, pembagian peran, serta evaluasi program juga diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Kolaborasi lintas agama dalam bidang kemanusiaan dapat memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat kerukunan, dan membentuk model pembangunan sosial yang inklusif serta berkelanjutan di Sumatera Utara.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Gini ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,309*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13000

Faganza, A. P., & Shoheh, R. (2023). *Peran Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia* [Working paper]. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13000

Fathoni, T. (2024). Konsep solidaritas sosial dalam masyarakat modern perspektif Émile Durkheim. *Journal of Community Development and Disaster Management*, *6*(2), 129–147. https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402

Fitriani, F., Harahap, I., & Utari, T. (2020). Membangun relasi umat beragama pasca konflik agama di Tanjungbalai. *Studia Sosia Religia*, *3*(1). https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7670

Hasibuan, R. H., Alparizky, M., Gultom, A. N., Adelia, P., Asmelia, F., Margolang, D. P., & Naldo, J. (2024). Melawan Kemiskinan Melalui Peningkatan Umkm di Dusun Pancuran, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, *1*(2), 535–541. https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3805

Hidayati, S. N., Nurhayati, & Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, *5*(1), 12–29. https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i1.730

Kasyfurrahman, T. N., Azhari, A. G., & Hekmatiyar, E. S. (2020). Tapak Tilas Agama Khonghucu Di Indonesia Dan Korelasi Ajaran Wu-Chang Dalam Menjaga Integrasi Nasional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, *15*(1), 145–162. https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.5790

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kristian, A. B. (2025). Keadilan sosial dan Injil: Memahami peran gereja dalam era ketidaksetaraan. *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, *7*(1), 13–35. https://doi.org/10.55076/didache.v7i1.382

Kuncono, O. S. (2025). Dao sebagai etika kebajikan dan kepribadian serta keharmonisan Khonghucu. *Study Park of Confucius Journal: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Agama*, *3*(2), 1–20.

Lahuri, S. B., Syamsuri, Kamaluddin, I., & Wulandari, Y. (2021). The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs). *Albukhary Social Business Journal*, *2*(2), 34–41. https://doi.org/10.55862/asbjV2I2a004

Lastriana, Y., Aulia, A. S., Aini, N. A., Ananda, W. R. S., & Tanjung, A. R. (2025). Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hindu, Buddha, dan Konghucu. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyaraka*, *5*(3), 415–427. https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1886

Makhrus. (2018). *Dinamika dan aktivisme filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat*. Litera.

Maulidha, N., Hidayat, R., & Muliana, H. (2024). Peran ekonomi Islam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, *1*(4), 367–372.

Munthe, R., Nasution, M. A., & Zamzila, K. (2024). Ajaran kemanusiaan agama Khonghucu dan Islam. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, *22*(1), 97–106.

Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali (W. 2004 M). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *5*(3), 338–347. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1990

Rahmadi. (2023). *Metodologi penelitian agama berbasis 4 pilar filosofi keilmuan*. Zahir Publishing.

Rahman, S. (2022). Menghadirkan Kesejahteraan Berbasis Rumah Tuhan: Penyuluhan Moderasi Beragama bagi Tokoh Lintas Agama Kemenag Bone bolango. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 53–58. https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i2.32

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza., S. (2023). Implementasi dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial: Studi kasus BAZNAS Bengkalis. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, *4*(1), 1–15. https://doi.org/10.22437/jief.v4i1.24230

Rogahang, S. S. N. (2024). *Agama dan kesejahteraan sosial*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sugata, A., Santoso, K., & Kabri. (2025). Peran dana dan kegiatan sosial Buddhis dalam membangun kesejahteraan spiritual bagi masyarakat modern. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, *3*(5).

Supit, K. M., Metuduan, O. R., & Metusala, Y. (2025). Usaha pastoral: Sunyi di balik kesenjangan ekonomi. *Maleosan: Jurnal Interdisipliner Spiritualitas dan Pendampingan Keluarga*, *1*(2), 140–150.

Susanti, K. D., Oktaviana, D., & Kusuma, A. A. G. M. (2024). Implementasi ajaran Dharma dalam sistem ekonomi Pancasila. *Maha Widya Duta*, *8*(2), 120–128.

Tamboto, S. A. (2025). *Nilai universal dalam ajaran-ajaran agama besar dunia*. Kompasiana. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/stanleyalexsander8420/649840f208a8b563197e34c2/nilai-universal

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Resolution A/RES/70/1). United Nations. https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations Development Programme. (t.t.). *Reduced Inequalities: Goal 10*. United Nations. United Nations Development Programme.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923